

*Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd
Rahmah Ningsi, S.H.I.,MA.Hk*



Modul Pembelajaran-On line 9

PERBANDINAGAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAIN

E-Learning

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2019**

MODUL 9

PERBANDINGAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAIN



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami pengetahuan (*knowledge*) tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, sehingga semua aktivitas pengamalan dapat dimanifestasikan

dalam sikap (*attitude*) dan tindakan/perilaku (*psikomotor/softskill*) sehari-hari sebagai warga negara yang Pancasila.

Pendahuluan

Setiap negara yang merdeka di atas planet bumi, pasti memiliki ideologi. Tanpa ada ideologi dapat dipastikan bukanlah suatu negara, sehingga ideologi menjadi syarat utama bagi keberadaan suatu negara. Ideologi Pancasila merupakan ideologi resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, digali dari akar budaya dan merupakan kristalisasi dari unsur-unsur sosio kultural bangsa Indonesia. Bahwa keanekaragaman suku bangsa, sosial budaya, ras golongan dan agama meminta Indonesia harus memiliki suatu ideologi yang dapat menyatukan keberagaman tersebut dalam ikatan yang kuat yaitu integrasi bangsa. Demikian pula negara-negara lain di dunia dapat dipastikan memiliki ideologi yang menjadi pedoman bagi mereka dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kajian berikut akan dipaparkan tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain di dunia.

Sebagai dasar Negara Indonesia, Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan hak-hak masyarakat. Selain itu bahwa manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga nilai-nilai Ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup negara dan masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai Ketuhanan, bahkan nilai Ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti digariskan di dalam pembukaan UUD 1945.

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Dengan mepedomani Pancasila para pejuang bisa mempersatukan berbagai golongan dan kelompok. Selain ideologi Pancasila, di tataran dunia ada banyak ideologi lain yang berkembang yaitu ideologi Liberalisme, Kapitalisme, Komunisme dan Sosialisme. Semua itu memiliki banyak perbedaan dengan

ideologi Pancasila. Perbedaan-perbedaan dengan ideologi lain itulah yang akan dibahas dalam kajian berikut.

Pengertian Ideologi Pancasila

Sebelum mengetahui perbandingan dan perbedaan ideology Pancasila dengan ideologi lain di dunia, maka terlebih dahulu akan diberikan pengertian tentang ideologi secara umum. Ideologi adalah gabungan dari 2 kata majemuk yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *eidos* dan *logos* secara sederhana, artinya suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang mendalam-dalhnya dan merupakan pemikiran filsafat. Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti:

1. Bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan, dan keamanan.
2. Bidang sosial.
3. Bidang kebudayaan
4. Bidang keagamaan

Maka ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakekatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
2. Oleh karena itu, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan hidup, pandangan dunia, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan, kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Ideologi erat sekali hubungannya dengan filsafat. Karena filsafat merupakan dasar dari gagasan yang berupa ideologi. Filsafat memberikan dasar renungan atas ideologi itu sehingga dapat dijemakan menjadi suatu gagasan untuk pedoman bertindak. Di sini jelas bahwa hubungan ideologi dan filsafat itu sukar dipisahkan. Ideologi berdiri berdasarkan landasan tertentu yaitu filsafat. Dan masalah ideologi adalah masalah pilihan. Ketepatannya tergantung kepada jiwa bangsa itu sendiri. Ideologi yang dianngapnya benar dan sesuai dengan jiwa bangsa, apa lagi yang telah terbukti tetap dapat bertahan dari segala godaan dan cobaan ideologi lain melalui gerakan-gerakan atau pemberontakan akan memperkuat keyakinan pentingnya mempertahankan ideologi.

Ideologi merupakan gagasan dan teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Oleh sebab itu kita akan menemukan beberapa penyimpangan para pelaksana ideologi didalam kehidupan disetiap negara. Implikasinya ideologi memiliki fungsi penting untuk menegaskan identitas negara atau untuk menciptakan rasa kebersamaan dalam satu bangsa. Disisi lain, ideologi rentan disalahgunakan oleh elit penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.

Menurut Oesman dan Alfian, ideologi adalah serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Menurut Soerjanto Poespowardojo, ideologi memiliki beberapa fungsi yaitu memberikan:

1. Struktur kognitif = keseluruhan yang didapat dari kejadian-kejadian dalam alam sekitar
2. Orientasi dasar = dengan membuka wawasan serta menunjukkan dalam kehidupan manusia
3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk bertindak
4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya
5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong untuk mencapai tujuan
6. Pendidikan bagi seseorang untuk memahami orientasi dan norma-norma yang terkandung didalamnya

Ideologi Pancasila

Pancasila berasal dari bahasa sansekerta, menurut Muhammad Yamin dalam bahasa sansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu:

- Panca artinya lima
- Syila artinya batu sendi, alas, dasar
- Syiila artinya peraturan tingkah laku yang baik/senonoh

Secara etimologis kata Pancasila berasal dari istilah Pancasyila yang memiliki arti secara harfiah harfiah yaitu dasar yang memiliki lima unsur. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan hak-hak masyarakat. Selain itu bahwa manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga nilai-nilai Ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup negara dan masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi

tidak melampaui hakikat nilai-nilai Ketuhanan, bahkan nilai Ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia.

Ideologi di negara-negara baru merdeka dan sedang berkembang, menurut Prof. W. Howards Wriggins, berfungsi sebagai sesuatu yang “*confirm and deepen the identity of their people*” (memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya). Namun ideologi di negara-negara tersebut, menurutnya sekedar alat bagi rezim-rezim yang baru berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Oleh sebab itu kita akan menemukan beberapa penyimpangan para pelaksana ideologi di dalam kehidupan tiap negara. Implikasinya ideologi memiliki fungsi penting untuk penegas identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa.

Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ideologi bangsa adalah cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode sebagai metode cara mewujudkan cita-cita tersebut. Menurut Alfian (1990) kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang terkandung dalam dirinya.

1. Dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya.
2. Dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukanlah angan-angan, yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktik kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensi ya.
3. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

Menurut Soerjanto Poespowardjo (1990), ideologi memiliki beberapa fungsi yaitu memberikan :

1. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitarnya.
2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia

3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melanggar dan bertindak
4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya
5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya.
6. Pendidikan bagi seseorang/masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah laku nya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Perhimpunan Indonesia (PI) yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta (1926-1931) di Belanda, sejak 1924 mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya, tujuan kemerdekaan politik haruslah di dasarkan pada 4 prinsip : persatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi dan kemandirian (SELFHELP) (Latif, 2011: 5). Pada tahun yang sama, Tan Malaka mulai menulis buku *Naar de Republiek Indonesia* (menuju republik Indonesia). Dia percaya bahwa paham kedaulatan rakyat memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat nusantara. Dia pernah mengusulkan kepada komintern (komunisme internasional) agar komunisme di Indonesia harus bekerja sama dengan PAN-Islamisme karena, menurutnya kekuatan Islam di Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja.

Tjokroaminoto mulai mengidealisasikan suatu sintesis antara Islam, sosialisme dan demokrasi (Latif, 2011: 6). Soepomo dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, memberikan tiga pilihan ideologi yaitu :

1. Paham individualisme
2. Paham kolektivisme
3. Paham integralistik.

Beliau dengan sangat meyakinkan menolak paham individualisme dan kolektivisme, dan menyarankan paham integralistik yang dinilai sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di pedesaan. Dalam filsafat Indonesia yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu (Latif, 2011: 47). Dari pendapat tersebut Indonesia pernah merasakan berkembangnya nilai-nilai ideologi-ideologi besar dunia berkembang dalam gerak tubuh pemerintahannya. Dasar-dasar negara adalah suatu fondasi yang terdiri dari unsur yang kuat dan kokoh untuk mendirikan suatu negara sehingga negara nantinya tidak runtuh dan bubar.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang membuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaannya. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berfikir dan kerja perjuangan. Ciri khas ideologi terbuka yaitu nilai serta cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan diglidan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya pun berasal dari konsensus (kesepakatan masyarakat).

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sumber semangat ideologi terbuka itu, sebenarnya terdapat dalam penjelasan umum UUD 1945. Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber pada pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa. Sehingga ideologi tersebut akan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Berbeda halnya dengan ideologi yang diimpor, yang akan bersifat tidak wajar dan banyak memerlukan pemaksaan oleh sekelompok kecil orang yang mengimpor ideologi tersebut. Dengan demikian ideologi tersebut bersifat tertutup. Contohnya ideologi komunis yang diimpor ke berbagai negara, sehingga ideologi ini tidak dapat bertahan lama, terbukti bubarnya negara Uni Soviet yang paling ekstrim dalam melaksanakan komunisme. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila :

- a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.
- b. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredakan perkembangan dirinya.
- c. Pengalaman sejarah politik masa lampau, seperti dominasi pemerintah orde baru untuk melaksanakan penataran Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila (P4), yang mana materi penataran P4 itu sesuatu yang dirumuskan oleh kemampuan pemerintahan, bukan atas keinginan dari segenap omponen masyarakat Indonesia, sehingga hasilnya jauh dari harapan yang diinginkan.
- d. Tekat untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hastrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Keterbukaan ideologi Pancasila ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Ada 3 tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah (sila Pancasila dalam pembukaan UUD 1945), nilai instrumental sebagai

sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan keadaan (pasal-pasal dari UUD 1945), dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya (pelaksanaan tindakan yang sesuai pasal-pasal UUD 1945).

Batas-Batas Keterbukaan Ideologi Pancasila

Ada batas-batas keterbukaan yang tidak boleh dilanggar oleh Pancasila yaitu:

- a. Stabilitas nasional yang dinamis
- b. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme dan komunisme.
- c. Mencegah berkembangnya paham liberal.
- d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat.
- e. Penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus.

Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Liberalisme

Politik liberalisme berpengaruh terhadap perkembangan paham demokrasi dan nasionalisme atas bangsa-bangsa di dunia. Bagi bangsa yang terjajah, liberalisme sejalan dengan pertumbuhan paham nasionalisme yang sama-sama menginginkan terbentuknya negara yang berpemerintahan sendiri kesadaran tersebut tumbuh karena setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Di bidang agama, penerapan paham liberalisme berarti setiap individu bebas memilih dan menentukan agamanya sendiri, serta menghendaki adanya kebebasan berfikir individu. Di bidang pers, politik liberalis memungkinkan seorang wartawan bebas memuat berita apapun yang ia ketahui, sementara para sastrawan bebas mengeluarkan pendapat dan mengutarakan hatinya. Masyarakat umum berhak membaca dan menilai sendiri tulisan para sastrawan dan wartawan. Mengenai konsep liberalisme, pada pokok pemikirannya yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Inti pemikiran, yakni kebebasan individu
2. Berkembang sebagai respon terhadap pola kekuasaan negara yang absolut
3. Landasan pemikirannya adalah bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi pekerti, tanpa harus diadakannya pola peraturan yang ketat dan bersifat memaksa
4. Sistem pemerintahannya harus demokrasi.

Ciri-ciri ideologi liberalisme adalah:

1. Negara sebagai penjaga malam. Rakyat atau warganya memiliki kebebasan untuk bertindak apasaja asal tidak melanggar tata tertib hukum
2. Kepentingan dan hak warga negara lebih diutamakan daripada kepentingan negara

3. Negara tidak mencampuri urusan agama. Warga negara bebas beragama, tetapi bebas juga tidak beragama.

Periode 1950-1959 disebut periode pemerintahan demokrasi liberal. Indonesia tidak menerima liberalisme dikarenakan individualisme barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya, sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Negara demokrasi model barat lazimnya bersifat sekuler (memisahkan antara agama dengan negara, hal ini tidak dikehendaki oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Kekuatan liberalisme terletak dalam menampilkan individu yang memiliki martabat transenden dan bermodalkan kebendaan pribadi. sedangkan kelemahannya, terletak dalam pengingkaran terhadap dimensi sosialnya sehingga tersingkir tanggung jawab pribadi terhadap kepentingan umum.

Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Sosialisme

Memasuki tahun 1990-an, ideologi komunis mengalami kemerosotan atau mungkin bisa disebut juga sebagai kehancuran. Hal ini disebabkan oleh sifat tertutupnya ideologi yang tidak mungkin bertahan di era globalisasi. Sementara itu, ideologi liberalisme yang memiliki ciri kebebasan dan kesetaraan masih dapat bertahan dan tersebar didunia. Masuknya liberalisme di beberapa negara berkembang menimbulkan terjadinya kebebasan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, Pancasila yang merupakan ideologi terbuka memberikan suatu solusi terhadap permasalahan tersebut.

Hal-hal pokok yang terkandung dalam sosialisme :

1. Inti pemikiran adalah kolektifitas (kebersamaan atau gotong royong)
2. Falsafahnya ialah pemerataan dan kesetaraan
3. Landasan pemikirannya ialah masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama
4. Sistem pemerintahan (boleh) berupa demokrasi atau otoriter.

Sosialisme sebagai suatu ideologi memiliki ciri :

1. Mementingkan kekuasaan dari kepentingan negara
2. Kepentingan negara lebih diutamakan dari kepentingan warga negara
3. Kebebasan atau kepentingan warga negara dikalahkan untuk kepentingan negara
4. Kehidupan agama juga terpisah dengan negara

Ideologi Pancasila memiliki ciri :

1. Hubungan antar warga negara dan negara adalah seimbang

2. Agama erat hubungannya dengan agama, artinya warga negara dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu agama yang ada dan diakui pemerintah.

Pancasila yang merupakan asas kerohanian (asas yang memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan) harus menjadi pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Lain halnya dengan ideologi komunisme, dimana ideologi tersebut tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak diakui. Ideologi komunis bersifat totaliter, karena tidak membuka pintu sedikit pun terhadap alam pikiran lain ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya bersikap dogmatis. Berbeda sekali dengan Pancasila yang memberikan kemungkinan dan bahkan menuntut sikap kritis dan rasional. Pancasila bersifat dinamis, mampu memberikan jawaban atas tantangan yang berbeda-beda pada zaman sekarang.

Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Fasisme

Fasisme merupakan sebuah bentuk ideologi nasionalis yang radikal dan otoriter. Fasisme menjadi konotasi negatif untuk berbagai rezim otoriter, kaum fasis meyakini bahwa suatu kebangsaan adalah komunitas organik yang membutuhkan kepemimpinan kuat, perasaan memiliki identitas yang tunggal, di samping itu juga percaya bahwa kekerasan dan perang melawan musuh diperlukan untuk menjaga vitalitas bangsa tetap kuat. Mereka memperjuangkan dibentuknya negara (dengan) satu partai serta menolak oposisi dalam bentuk apapun

Kaum fasis merupakan penantang paling kuat dari prinsip-prinsip utama pencerahan Eropa berikut berbagai ideologi yang mengikutinya, baik liberalisme dan sistem pasar bebasnya maupun sosialisme. Fasisme menolak pembagian sosial berdasarkan kelas ekonomi ataupun suatu perjuangan berbasis kelas, mereka yakin bahwa fasisme adalah suatu gerakan yang mengakhiri konflik kelas demi menyatukan dunia.

Asal mula ideologi fasis berdasar dari gerakan nasionalis-sindikalisme pada masa PD I (sindikalisme adalah salah satu gerakan buruh di Eropa). Aspek mendasar fasisme adalah :

1. Nasionalisme fasisme melihat perjuangan bangsa dan ras adalah mendasar bagi masyarakat, dan menolak konsep perjuangan kelas kaum Marx.
2. Ekspansi imperialis sebagai dasar politik luar negeri, karena dipercaya bahwa perang dan ekspansi adalah bukti ketangguhan bangsa
3. Otoritariannisme, kaum fasis mengidealkan negara totaliter

4. Darwinisme sosial, kaum fasis umumnya mengadopsi pandangan darwinisme sosial tentang “seleksi alamiah” dari Ras dan bangsa
5. Intervensi sosial dalam bentuk indoktrinasi secara masif untuk menanamkan ideologi negara, pengendalian populasi dan program penyehatan ras melalui eugenika, pelegalan aborsi dalam kasus kelahiran yang cacat, dan pembasmian orang-orang cacat, dan berpenyakit melalui euthanasia.

Latar belakang lahirnya fasisme :

1. Runtuhnya negara-negara dinastik yang masih bertahan (kecuali Inggris)
2. Revolusi bolshevik (komunis) di Rusia tahun 1917
3. Kehancuran ekonomi sebagai akibat perang khususnya bagi negara-negara yang kalah
4. Adanya kekecewaan di negara-negara yang kalah perang (khususnya Jerman) dalam mematuhi syarat-syarat perdamaian.

Pusat gerakan fasis adalah partai Fasis Italia (Benito Mussolini) dan partai sosialis nasional Jerman (Nazi atau Adolf Hitler), kemudian menyebar ke negara lain.

Daftar Pustaka

- Badjeber, Zain 2016. *Menyimak dan Menerapkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang (Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.". *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Edisi revisi kesepuluh,Paradigma, Yogyakarta.
- Kemristek Dikti. 2016. *E-Book Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kusuma. A.B. 2016. *Weltanschauung dan Dasar Negara*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Paristiyanti Nurwandani, dkk, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.
- Suwarno, P.J., 1993,*Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syarbaini, Syahrial. 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Surip,. Syarbini,. dan Rahman. 2015. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Tobing, Jakob. 2016. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebuah Bahasan Ringkas*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

